



**BULETIN**

# PARLEMENTARIA

NOMOR 938/III/XII/2016

**Sidang APA ke-9 di  
Kamboja Hasilkan 19 Resolusi**

**Uni Eropa Akui Indonesia  
Sebagai Mitra Strategis**

**Indonesia Harus Intensif  
dan Berkelanjutan Terlibat  
Tangani Krisis Rohingya**

Oddar Meanchey

Banteay  
Meanchey

Preah Vihea

Siem Reap

Battambang

Kampong  
Thom

Pursat

Kampong  
Chhnang

Kamp  
Cha



ASIAN PARLIAMENTARY ASSEMBLY  
THE 9<sup>TH</sup> PLENARY SESSION



INAUGURAL CEREMONY

“Promoting Peace and Sustainable Development in Asia”

2<sup>nd</sup> November 2016



**GRATIS**  
Tidak Diperjualbelikan



Delegasi DPR RI pada sidang APA ke - 9

## Sidang APA ke-9 di Kamboja Hasilkan 19 Resolusi

Sidang Pleno *Asian Parliamentary Assembly* (APA) ke-9 pada Kamis (1/12) di Provinsi Siem Reap, Kamboja, hasilkan Deklarasi Siem Reap yang berisi 19 resolusi tentang isu-isu politik, sosial ekonomi, dan budaya serta pembangunan berkelanjutan.

Menurut pimpinan delegasi DPR RI yang juga Wakil Ketua BKSAP DPR RI Juliari P Batubara usai penutupan Sidang Pleno mengatakan bahwa resolusi-resolusi yang dihasilkan dan disepakati hendaknya bisa terus dimonitor implementasinya.

"Dari awal saya pernah menyampaikan kepada beberapa delegasi, bahwa apa yang telah kita sepakati, apa yang telah menjadi resolusi, benar-benar bisa dimonitor implementasinya. Percuma saja kalau kita hanya menyepakati resolusi itu tapi pada implementasinya tidak termonitor di masing-masing parlemen anggota," ujar Juliari.

Memang, lanjutnya, meski resolusi ini tidak mengikat namun idealnya dengan

kebijakan yang sesuai dengan resolusi tersebut untuk tetap dilanjutkan. "Yah meski tidak mengikat dan tidak ada *punishment* nya juga," terang Juliari politisi dari PDIP ini.

Berikut salah satu isinya, Deklarasi Siem Reap menyatakan keprihatinan atas isu-isu serius seperti terorisme dan kekerasan ekstremisme yang telah mengganggu keamanan dan perdamaian, yang membentuk dasar untuk pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia dan dunia.

Deklarasi ini pun merasa prihatin pada satu miliar orang di Asia bisa dalam menghadapi kekurangan air di tahun 2050. Untuk itu, deklarasi menyoroti perlunya negara-negara di kawasan Asia untuk fokus

dalam kebijakan nasional tentang masalah air dan sanitasi.

Deklarasi ini juga menyerukan kerjasama aktif negara dalam menanggapi perubahan iklim dan pengiriman komitmen dalam Perjanjian Paris diadopsi oleh Konferensi ke-21 dari Para Pihak (COP21) untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim.

Menggaris bawahi pentingnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, APA mendesak untuk menerapkan 2030 Agenda Pembangunan Berkelanjutan, terutama tujuan sosial-ekonomi dan lingkungan. Sidang APA ke-9 di Siem Reap pun secara resmi di tutup pada Kamis (1/12) sore waktu Kamboja. ■

(ut) Foto: Nita/br

# Kerjasama Parlemen Penting untuk Pengembalian Aset Hasil Korupsi

Kerjasama parlemen antar-negara diakui sangat penting untuk memperlancar proses pengembalian aset (asset recovery). Ini penting ketika membincang isu pemberantasan korupsi di tingkat global.

**D**emikian ditegaskan Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon yang juga Presiden *Global Organization of Parliamentarians Against Corruption* (GOPAC) di Panama dalam pertemuan 17th *International Anti-Corruption Conference* 2016. Acara ini berlangsung pada 1-4 Desember 2016 lalu. Komitmen ini sebenarnya sudah tertuang dalam *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC), yang menegaskan pengembalian aset sebagai salah satu prinsip mendasar.

Semua negara yang telah meratifikasinya, wajib merumuskan kebijakan domestik yang mendukung proses pengembalian aset. Fadli menyampaikan, banyak aset hasil korupsi yang seringkali berasal dari negara-negara berkembang, lalu disimpan di negara-negara *safe haven*. Ironisnya, rata-rata negara *safe haven* tidak memperkenankan untuk memberi informasi data kepemilikan aset yang disimpan di negaranya tersebut.

Meskipun sudah ada ketentuan multilateral yang mengaturnya, lanjut Fadli,



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon hadir di IACC di Panama

upaya pengembalian aset masih jadi masalah yang sangat kompleks. Dalam konferensi yang dihadiri peserta dari 130 negara itu, Fadli mengungkapkan, setidaknya ada 3 tantangan utama dalam pengembalian aset. Pertama, adanya perbedaan kerangka hukum antar-negara. Kedua, masih minimnya keterampilan teknis yang dimiliki negara dalam mengupayakan pengembalian aset. Dan ketiga, lemahnya *political will* dan *trust* antar-negara.

Di sinilah, kata Fadli, pentingnya para anggota parlemen membantu menangani hambatan pengembalian aset. Dengan

produk legislasinya, para anggota parlemen dapat mendorong penguatan hukum domestik untuk mendukung pengembalian aset. Yang juga sangat fundamental adalah meningkatkan *political will* dan membangun mutual *trust* antar-negara. Meskipun negara-negara sudah terikat kesepakatan multilateral, namun seringkali terhambat di level bilateral.

GOPAC, seru Fadli, dapat menjadi *platform* bagi seluruh anggota parlemen dunia dalam membangun *trust* dan meningkatkan *political will*

setiap negara dalam mendukung upaya pengembalian aset. Ada IACC sebagai forum global yang menjadi wadah bagi anggota parlemen, kepala negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk bersama-sama berperan melawan korupsi.

Sejak berdiri pada tahun 1983, IACC selalu menyelenggarakan konferensi di negara yang berbeda-beda setiap dua tahun sekali. Peserta yang hadir antara 800-2.000 orang dan berasal lebih dari 135 negara di seluruh dunia. Dan konferensi kali ini adalah konferensi ke-17 yang mengangkat tema "Time for Justice: Equity, Security, Trust". ■

(opsip), foto: abk.bkapp/br



**PENGAWAS UMUM** Pimpinan DPR RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI) **WAKIL KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN) **PIMPINAN PELAKSANA** Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen) **PIMPINAN REDAKSI** Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak) **WK. PIMPINAN REDAKSI** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega **REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M. Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadhil **ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita

**PIMPINAN PENERBITAN** Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan), **WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi) **STAFF PRODUKSI** Eko Muriyanto, Barliansyah, Fathurahman, Mujiono, Farid, SE **SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom, Remon Ifan, Siti Rondiyah, Oji, Lamin, Arif Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email penerbitandpr@gmail.com

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS) | ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN |**

## Pastikan RUU Hasil Pembahasan DPR RI Berkualitas

Institusi DPR RI di Indonesia diamanahkan oleh UUD 1945 sekaligus ditugaskan untuk menjadi pintu masuk perumusan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Oleh karenanya harus dipastikan bahwa setiap RUU yang disusun dan dibahas di DPR RI, memiliki kualitas yang baik, sehingga mampu menjawab tantangan yang akan dibutuhkan sesuai hukum yang ada di masyarakat.

**H**al tersebut disampaikan Ketua DPR RI Setya Novanto saat membuka seminar yang diselenggarakan oleh Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (06/12).

"Sanksi administratif *versus* sanksi pidana adalah suatu problematika dalam menegakkan hukum, dan keberadaan kedua sanksi tersebut dalam suatu sistem hukum merupakan bentuk modernisasi hukum. Permasalahan yang timbul dalam praktek pembentukan undang-undang dan masih belum terjawab adalah mengenai masalah-masalah



Ketua DPR RI Setya Novanto

bagaimana agar sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam hukum dapat dirumuskan dengan tepat, kesiapan aparaturnegara dalam pelaksanaannya, serta bagaimana dampak yang

ditimbulkan dari adanya sanksi administratif tersebut," kata Novanto.

Menurutnya, melalui forum seminar tersebut dapat dirumuskan suatu kesepakatan mengenai model terbaik dalam memformulasikan pembaharuan atau modernisasi hukum dalam bentuk sanksi administrasi dan sanksi pidana.

"Saya sangat mengapresiasi dan mendukung agar Badan

Keahlian senantiasa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seminar atau *workshop*, yang diharapkan dapat menambah pengetahuan kita," ucapnya. ■

(dep) Foto: Anubi/br

## Ketua DPR RI Hadiri Silaturahmi dan Peresmian Pengurus Wartawan DPR RI

Ketua DPR RI Setya Novanto menghadiri silaturahmi sekaligus peresmian pengurus *Press Room* atau wartawan koordinatiorat DPR RI pada Kamis (1/12) di Ruang Media Center, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta.

**K**epada seluruh pengurus yang baru periode 2016-2018, Setya Novanto mengucapkan selamat dan meminta agar apa yang sudah dilakukan dengan baik dapat diteruskan dan apa yang kurang bisa diperbaiki. Hal ini sebagai upaya DPR RI untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dengan informasi yang tepat dan akurat,

"Saya ucapkan terimakasih pada seluruh pers yang ada, saya ucapkan selamat pada pengurus yang baru, saya

juga ucapkan terimakasih pada pengurus yang lama apa yang sudah dikerjakan yang selama ini sudah baik dengan ruangan yang sudah tertata secara baik," ujar Novanto. Ketua Umum Partai Golkar ini pun meminta pada pengurus *Press Room* yang baru dapat lebih meningkatkan



Ketua DPR RI Setya Novanto bersama pengurus *press room* DPR RI

kualitas, karena hubungan antara DPR RI dengan masyarakat sangat dibutuhkan. Sehingga diharapkan informasi yang disajikan dapat berjalan dengan cepat. "Dan tentu pada pengurus baru, mohon kualitasnya lebih ditingkatkan. Karena hubungan parlemen dengan masyarakat ini merupakan hubungan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga diharapkan semua informasi bisa

berjalan cepat, karena putusan yang ada di DPR RI ini adalah putusan yang aktual," jelasnya.

Ia pun juga menegaskan akan terus bersinergi dengan pengurus *Press Room* yang baru. Novanto pun meminta kepada pengurus *Press Room* untuk menyampaikan apa saja yang kurang untuk dapat ditindaklanjuti. "Saya ucapkan selamat, apa yang perlu dibantu oleh saya selaku Ketua DPR RI yang

baru silahkan saja. Apa yang kurang tolong disampaikan," ujarnya.

Acara silaturahmi dengan wartawan media cetak, *online*, televisi dan radio ini juga dihadiri Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta dan Hidayat Nur Wahid, Ketua DPD RI Muhammad Soleh serta beberapa Anggota DPR RI seperti Roem Kono dan Satya W. Yudha serta pejabat dari Kesekjenan DPR/MPR RI. ■

(sf), Foto: arif/br

## Uni Eropa Akui Indonesia Sebagai Mitra Strategis

Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia Vincent Guerend mengakui Indonesia adalah mitra strategis bagi UE. Selain sebagai anggota G20, Indonesia juga merupakan negara muslim terbesar di dunia dan punya posisi strategis pula di Asia.

Demikian terungkap dalam konferensi pers usai diterima Ketua DPR RI Setya Novanto di DPR RI, Senin (5/12). Novanto sendiri mengapresiasi UE yang tetap mempertahankan kerjasama strategisnya dengan Indonesia di berbagai sektor. Ini penting untuk mendukung program pembangunan Indonesia.

"Kami menyambut baik, karena Indonesia-UE telah menunjukkan kemajuan dalam semua bentuk kerjasama. UE sebagai kekuatan ekonomi dan politik global dapat menjadi mitra penting untuk mendukung pencapaian program-program pembangunan Indonesia," ujar Novanto. Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Vincent, Novanto banyak membicarakan kerja sama ekonomi dan pertukaran mahasiswa untuk peningkatan sumber daya manusia Indonesia.

Kerjasama ekonomi dan investasi, lanjut Novanto, harus tetap terjaga antara Indonesia-UE walaupun Inggris sudah keluar dari komunitas UE. Sementara itu, Vincent sekali lagi



Ketua DPR RI Setya Novanto saat menerima Duta Besar Uni Eropa

mengakui, Indonesia sangat penting sebagai mitra UE. Kerjasama di berbagai sektor harus terus ditingkatkan. Kerjasama parlemen juga tak lupa jadi perbincangan kedua pihak. UE berharap agar ada perbaikan kelompok kerjasama parlemen antara DPR RI dan parlemen UE.

Persoalan politik mutakhir di

Tanah Air tak luput jadi perbincangan hangat pula. Saat ini, kata Novanto, politik Indonesia sudah membaik. Dan partai yang dipimpinnya kini sudah memberikan dukungan penuh kepada Presiden Joko Widodo yang sedang memimpin pemerintahan. Soal politik terkini di Indonesia, Vincent di

hadapan pers berkomentar, Indonesia adalah negara demokratis terbesar di dunia yang selalu ramai diperbincangkan. Dalam menegakkan demokrasi, Indonesia telah menjalankannya sesuai aturan main yang berlaku di dalam negeri Indonesia sendiri. Ini sangat positif bagi kemajuan demokratisasi di Indonesia. ■

(mb), foto: antri/br

## Baleg Setuju Revisi Terbatas UU ASN

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui revisi terbatas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dibawa ke pembahasan tingkat II menjadi inisiatif DPR RI. Sepuluh Fraksi DPR RI setuju revisi terbatas RUU ASN dilanjutkan ke Rapat Paripurna terdekat.

“Insya Allah, RUU ini bisa menjawab problematika honorer selama ini. Kami mengharapkan teman-teman dapat mengawal perjalanan RUU ASN ini,” ungkap Firman Soebagyo usai mendengarkan laporan Ketua Panja RUU ASN Arif Wibowo yang disambut tepukan tangan para honorer yang mendatangi Baleg di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (01/12).

Inisiator RUU ASN Rieke Diah Pitaloka mengatakan terdapat beberapa poin yang mengemuka dalam revisi terbatas RUU ASN. Termasuk, usulan tentang dihapusnya Komite ASN agar lebih efektif dan efisien dari sisi anggaran.

Rieke menambahkan revisi terbatas



Pimpinan Baleg tandatangani draf revisi terbatas UU ASN

mengakomodir Sistem Jaminan Sosial Nasional kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), antara lain: Jaminan Kerja, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian.

"Diatur definisi yang jelas mengenai

PPPK. Ini juga tidak sembarangan orang disebut PPPK dan ketika pekerjaannya itu menerus tidak bisa dikategorikan PPPK. Kemudian tidak kalah penting, menyelesaikan problematika honorer, pegawai tidak tetap, pegawai non-PNS sisa dari rekrutmen beberapa tahun lalu," tambah politisi dari F-PDIP itu.

Diharapkan, lanjut Rieke, revisi terbatas RUU ASN bisa segera diputuskan menjadi inisiatif DPR RI

dalam Rapat Paripurna mendatang. Setelah itu, pimpinan DPR RI akan berkiriman surat kepada Presiden dan Presiden akan mengirim Surpres untuk menugaskan kementerian terkait dalam pembahasan RUU tersebut. "Harapan kami, satu kali masa sidang selesai," tandasnya. ■

(ann.mpr) Foto: Nafarajidhar

## Sidang APA ke-9 di Siam Reap, Kamboja Resmi Ditutup

Sidang Pleno ke-9 Asian Parliamentary Assembly (APA) di Provinsi Siem Reap, Kamboja, Kamis Sore (1/12) resmi ditutup. Sidang kali ini mengusung tema "Promoting Peace and Sustainable Development in Asia" dimulai sejak Senin 28 November, dengan dihadiri 23 parlemen dari 42 anggota ini membahas sejumlah isu yang menjadi sorotan terkini.

Delegasi Parlemen Indonesia dipimpin Wakil Ketua BKSAP Juliari P Batubara, serta anggota BKSAP, Dave Akbarshah Fikarno (F-PG), Sartono (F-PD), dan M. Arief Suditomo (F-Hanura).

Sejak pembukaan pada Senin (28/11) hingga resmi ditutup. Delegasi Indonesia aktif memberikan pandangannya terkait sejumlah isu seputar kawasan Asia di sejumlah sidang komite, baik itu yang membahas sosial budaya, parlemen perempuan,

pembentukan parlemen Asia, politik, ekonomi dan keuangan.

Peran aktif delegasi DPR RI terlihat pada sesi *Executive Council Meeting* pada Senin lalu, dimana DPR RI berjuang agar persoalan *migrant workers* tetap dimasukkan kedalam agenda rapat. Ini dikarenakan adanya permintaan dari anggota APA yang berasal dari negara Teluk untuk mendropnya.

Delegasi Indonesia pun dalam *Standing Committee Meeting of Social and Cultural Affair* penyusunan *draf resolution*

*on protection and promotion of the rights of migrant workers* sempat berdebat dengan delegasi parlemen Saudi Arabia, Bahrain dan Rusia kaitannya dengan definisi *migrant workers* yang mereka kemukakan.

Lalu pada sesi *general* debat, delegasi Indonesia berkesempatan menyampaikan pandangannya mengenai radikalisme dan terorisme, serta mengemukakan pendapatnya mengenai pembentukan parlemen Asia dan isu-isu lainnya.



Suasana penutupan acara Asian Parliamentary Assembly (APA) di Provinsi Siem Reap, Kamboja

Delegasi Indonesia pun melakukan pertemuan dengan delegasi Parlemen Turki, guna membicarakan hubungan kerjasama antara kedua parlemen.

Akhirnya Sidang APA ke-9 dengan persetujuan semua anggota APA menghasilkan Deklarasi Siem Reap yang terdiri dari 19 resolusi tentang isu-isu politik, sosial ekonomi, dan budaya serta pembangunan berkelanjutan.

Dan yang tak kalah penting, Sidang Pleno APA sekaligus memutuskan Parlemen Turki menjadi Presiden APA selanjutnya serta menjadi tuan rumah APA ke-10 dan APA ke-11 pada tahun 2018 dan 2019. Diiringi oleh Parlemen Buthan, Bahrain, Pakistan dan Uni Emirat Arab sebagai Wakil Presiden APA.

Pada Jum,at (2/12) seluruh delegasi anggota APA meninggalkan Siem Reap untuk kembali ke negara asalnya. ■

(nt) Foto: Nita/od

## Terkait Buruh Migran Bisa Disiasati Lewat Perundingan Bilateral

Wakil Ketua BKSAP yang juga Pimpinan Delegasi DPR RI Juliari P Batubara disela-sela Sidang APA ke-9 di Siem Reap, Kamboja mengatakan ada sejumlah resolusi yang akan disepakati di APA *Plenary Session* kali ini. Diantaranya adalah, salah satu resolusi yang sangat penting mengenai perlindungan terhadap *migrant workers*.

“ Mengenai *migrant workers*, dimana negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Kuwait, Bahrain sangat berkeberatan mengikuti konvensi yang ada di ILO. Tapi yah kita tetap mendesak, karena hal tersebut merupakan kesepakatan dari negara-negara ILO, yah mereka harus tetap mengikuti,” katanya Kamis, (1/12)

Ketika ditanya Parlementaria, bahwa negara Teluk tidak tergabung di ILO, Juliari menjawab bahwa memang hal itu menjadi masalah. “Yah kita sudah berjuang sekuat tenaga untuk memaksa mereka mengikuti itu, tetapi memang itu kan kedaulatan masing masing negara juga, bahwa kalau memang dia tidak mengikuti atau meratifikasi ILO itu memang tidak punya kewajiban untuk mengikuti. Tetapi mungkin kita bisa siasati dengan perundingan bilateral dengan negara-negara yang menjadi tujuan *migrant workers* dari Indonesia,” terangnya.

Juliari melanjutkan, resolusi lainnya adalah mengenai isu soal lingkungan, juga resolusi tentang terorisme. “Pada intinya hampir semua anggota *Asian Parliamentary Assembly* sepakat bahwa kita



Delegasi BKSAP DPR RI dipimpin Juliari P Batubara saat Sidang APA ke-9 di Siem Reap,

negara-negara anggota parlemen di kawasan Asia harus lebih berjuang untuk membuat negara negara Asia itu lebih makmur dan sejahtera,” tegasnya.

Sekedar informasi, *Asian Parliamentary Assembly* merupakan forum antar parlemen di kawasan Asia yang bertujuan untuk mendorong kerjasama

dalam penyelesaian isu yang menjadi perhatian bersama.

Delegasi DPR RI dalam sidang APA ke-9 kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP Juliari P Batubara, serta anggota BKSAP Dave Akbarshah Fikarno (F-PG), Sartono (F-PD), dan M. Arief Suditomo (F-Hanura). ■

(nt) Foto: Nita/od

# BURT DPR RI Minta RS Advent Bandar Lampung Lengkapi Tenaga Kesehatan

Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2014 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan dan anggota lembaga Tinggi Negara, BURT DPR RI bekerjasama dengan Jasindo sebagai *provider* program JAMKESMEN dan JAMKESTAMA mengunjungi RS Advent Bandar Lampung, Jumat (02/12).

**K**unjungan Tim BURT dipimpin Wakil Ketua BURT Hasrul Azwar (F-PPP) disambut oleh Direktur RSABL Reuben VJ Supit didampingi Kepala Cabang Jasindo Lampung Lukky Wijaya.

Wakil Ketua BURT DPR RI Hasrul Azwar dalam pertemuan meminta RS Advent Bandar Lampung untuk segera membuat prosedur normal bagi Anggota DPR RI yang akan berobat, sekaligus melengkapi *database* Anggota DPR RI beserta keluarganya, juga melengkapi fasilitas RS berikut Tenaga Dokter Spesialis Jantung.

Menurut Hasrul, RS Advent Bandar Lampung merupakan salah satu RS *provider* yang diberikan kepercayaan oleh Jasindo untuk merawat Anggota DPR RI yang mungkin akan berobat ke RS tersebut.

"Kita tadi minta untuk segera ada prosedur yang baku untuk melayani Anggota DPR RI. Apabila ada Anggota DPR RI yang sakit cukup menunjukkan kartu Jasindo dan memiliki sebuah prosedur normal artinya ada loket khusus. Jadi Jasindo sudah menyatakan mereka sudah memiliki daftar 560 nama orang Anggota DPR RI dan keluarganya dan akan menerapkan prosedur normal itu," tutur Hasrul Azwar.

Dalam menyiapkan pelayanan prima bagi Anggota Dewan dan keluarganya, Hasrul menjelaskan terdapat 8 *bed* untuk VVIP, namun mereka belum memiliki dokter ahli spesialis jantung. Mereka berjanji akan mengusahakan dalam waktu dekat untuk memiliki dokter spesialis jantung.

Dia juga berharap hubungan RS Advent sebagai *provider* dengan Jasindo terus berjalan baik.

"Tidak pernah ada komplain, keluhan dari RS Advent kepada Jasindo, jadi sejauh ini baik-baik saja dan kita harapkan itu berlangsung terus," katanya.



*Tim Kunspek BURT dipimpin Wakil Ketua BURT Hasrul Azwar kunjungi RS Advent Bandar Lampung*

Turut serta dalam Tim Kunjungan BURT DPR RI ini politikus Fraksi PKB Syaiful Bahri dan menjelaskan, kehadirannya untuk mengunjungi RS-RS *provider* itu dalam rangka melihat lebih dekat sejauh mana kesiapan RS untuk melayani para Anggota Dewan dan keluarganya.

"Baik sisi dokter, pelayanan, infrastruktur lain termasuk peralatan. Ini dalam rangka memenuhi aturan Perpres sehingga tidak mengecewakan para Anggota DPR RI dan keluarganya ketika berobat di RS tersebut," jelasnya.

Terkait belum adanya tenaga dokter spesialis jantung di RS Advent Bandar Lampung, Syaiful berharap pihak RS segera menepati janjinya untuk menghadirkan dokter spesialis jantung dalam waktu 2 bulan lagi.

"Fasilitas seperti itu harus dipenuhi karena kita tahu penyakit yang sering menimpa Anggota Dewan itu kan jantung dan stroke. Yang kedua, kalau ada peralatan yang kurang untuk pelayanan kepada Anggota Dewan itu juga supaya

segera dipenuhi. Ini semua dalam rangka untuk memenuhi Perpres sehingga tidak ada keluhan ketika ada salah seorang Anggota Dewan dan keluarganya sakit berobat ke RS tersebut," ujarnya lagi.

Terkait pelayanan kesehatan bagi para pejabat tinggi Kementerian Lembaga dan Anggota Dewan, kata Syaiful, hal tersebut bukan untuk membedakan pelayanan antara pejabat, anggota maupun masyarakat sipil biasa. Pasalnya etos dan jam kerja tidak teratur, yang dialami oleh Anggota DPR RI mengharuskan memiliki tingkat kesehatan yang prima.

"DPR RI itu kan kerjanya gak punya jam, ketika harus membahas RUU bisa sampai pagi, sehingga harus mempunyai kesehatan yang prima. Apalagi sudah ada Perpres bahwa DPR RI itu merupakan pejabat tinggi negara harus dilayani secara prima, makanya perlunya pengertian antara *provider* dan RS maupun pihak terkait lainnya. sehingga tidak mengalami kesulitan di kemudian hari," ia menambahkan. Kunker spesifik BURT ini diikuti anggota Rita Zahara (F-Gerindra). ■

## Full Day School Harus Disesuaikan Dengan Kondisi Sosial Masyarakat

Terkait rencana pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI) menerapkan *Full Day School*, Ketua Tim Kunjungan Spesifik Bidang Kepemudaan Komisi X DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Mujib Rohmat menyatakan kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia.



Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat

“ Kami mengharapkan kebijakan tersebut disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia, dan berdasarkan dari pemikiran yang matang serta penelitian yang cukup,” kata Mujib kepada Parlemen usai pertemuan dengan Sekda Provinsi NTB Rosyadi H. Sayuti di Mataram, Jumat (02/12)

Dalam kesempatan tersebut, politisi Partai Golkar ini juga mempertanyakan, apakah masyarakat sudah tahu kebijakan ini akan dilakukan, bagaimana kesiapan tenaga pengajar, dan bagaimana dengan anggarannya.

Menurutnya, pada kenyataannya masih banyak guru yang

belum sejahtera. "Pada jam-jam tertentu selesai, langsung dia (guru) juga mencari atau menambah pekerjaan yang lain," tukasnya.

Pertanyaannya kemudian, lanjutnya, apakah negara sudah cukup mampu. Dan bagaimana dengan anggarannya.

Ia menegaskan, sebetulnya *Full Day School* ini bukan sesuatu yang baru di Indonesia, pesantren itu sudah dari dulu *Full Day School*. Tapi sudah ada kesiapan mental dari orangtua dan anaknya yang akan masuk ke pesantren.

"Dia memilih di pesantren karena memang dia sudah siap dengan segala konsekuensinya. Dan orangtua sudah mempersiapkan mentalnya untuk berjauhan dengan anaknya," imbuhnya. ■

(fb), foto: jayudi/br

## Potensi Pemuda Kalteng Sangat Bagus

Potensi para pemuda di Kalimantan Tengah (Kalteng) dinilai sangat bagus. Selain berprestasi, juga memiliki kapasitas yang memadai dalam menghadapi persaingan di tingkat nasional dan regional. Pemerintah perlu memberi perhatian lebih terhadap sarana kepemudaan di daerah.

Demikian disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Zainul Arifin Noor di Palangkaraya, Kalteng, Jumat (2/12), usai melakukan rangkaian kunjungan kerja dengan meninjau sarana dan prasarana kepemudaan. Menurutnya, pemerintah perlu memberi perhatian serius lewat alokasi pendanaan untuk memperbaiki sarana gedung kepemudaan yang rusak.

Komisi X DPR RI sendiri sempat melihat dari dekat fasilitas gedung KNPI Kalteng yang tidak terawat, karena kekurangan anggaran untuk pemeliharaan gedung. Padahal, kata Zainul, potensi pemuda di Kalteng sangat bagus. Prestasinya juga cukup baik. Pemuda Kalteng juga banyak melakukan kegiatan positif untuk membangun sumber dayanya.

"Saya melihat potensi pemuda Kalteng cukup bagus. Mereka antusias dengan segala kegiatannya. Sebagai fasilitator, kita perlu memberi bantuan bagi mereka untuk meningkatkan sumber dayanya. Dengan peninjauan Komisi X DPR RI ini, mudah-mudahan apa yang mereka inginkan bisa segera terakumulasi," kata politisi PKB ini.

Pada bagian lain, politisi dari dapil Kalsel tersebut, mengomentari soal persaingan SDM dalam menghadapi MEA. Kemampuan berbahasa asing jadi kompetensi penting untuk memenangkan persaingan di tingkat regional. "Harapan kita, mereka harus punya sesuatu yang jadi pegangan, terutama bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi penting. Kalau tidak

memiliki kemampuan bahasa yang bagus, saya tidak yakin bisa berjalan dengan baik dalam menghadapi persaingan," imbuh Zainul lagi. ■

(mb), foto: husein/br



Anggota Komisi X DPR RI Zainul Arifin Noor

## Komisi X Dukung Moratorium Ujian Nasional

Komisi X DPR RI mendukung moratorium Ujian Nasional (UN) yang diwacanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjungan mengatakan, dengan memoratorium UN, berarti Mendikbud sudah mengetahui ruh dari pendidikan.

“ Dengan langkah moratorium UN yang akan diambil oleh Mendikbud itu menunjukkan bahwa Mendikbud sudah mengerti ruh pendidikan. Saya acungkan dua jempol, jika ada sepuluh jempol, akan saya berikan sepuluh jempol,” katanya, saat rapat kerja dengan Mendikbud, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/12).

Menurut politisi Fraksi Partai Golkar itu, dengan mengambil kebijakan moratorium UN, Mendikbud akan mengembalikan evaluasi pendidikan sesuai dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 58-59, yang menjelaskan bahwa penilaian adalah hak guru bukan Pemerintah.

Sebagaimana diketahui, Pasal 58 UU Sisdiknas menjelaskan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Sementara, Pasal 59 menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

"Kan sudah jelas di UU Sisdiknas pasal 58-59 itu menjelaskan bahwa penilaian adalah hak guru, bukan hak pemerintah. Jadi selama ini kita melanggar. Berarti kita akan kembali kepada undang-undang



Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjungan

dengan segala kelemahannya," imbuh Popong.

Popong menambahkan, dengan adanya penghapusan UN, hal ini juga dapat menghemat anggaran hingga lebih dari Rp 500 miliar. Anggaran itu bisa dialihkan pada perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Namun ia mengingatkan, kebijakan ini harus didukung oleh Instruksi Presiden, sehingga pengalihan anggaran dapat tepat sasaran.

Walaupun kebijakan moratorium UN ini terkesan lambat, namun Popong tidak mempermasalahkan hal itu. Menurutnya, UN bisa diselenggarakan, namun dengan catatan, tingkat pemerataan pendidikan di setiap daerah sudah merata.

"Moratorium ini terlambat, seharusnya dari dulu dari tahun 2008, tapi biar lambat

asal selamat," kata politisi asal dapil Jawa Barat itu, sembari mengingatkan bahwa pengambilan kebijakan ini harus hasil dari penelitian yang mendalam.

Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, perubahan kebijakan terkait UN ini merupakan tindak lanjut terkait langkah untuk mengkaji ulang UN. Menurutnya, moratorium UN juga berdasar pada data profil UN tiga tahun terakhir, yakni 2014, 2015, dan 2016. Terdapat

lima kategori pencapaian, meliputi sangat baik, baik, cukup, kurang, serta tidak dapat dianalisis.

"Yang sangat baik peningkatannya tidak lebih dari satu persen. Sementara untuk yang kategori kurang ditambah yang tidak dapat dianalisis di atas 70 persen. Inilah kondisi pendidikan kita," jelas Mendikbud.

Berdasarkan modal data tersebut, Mendikbud mengklaim telah memiliki peta kondisi pendidikan. Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang moratorium UN. "UN 2016 dilakukan untuk pemetaan dan kami sudah tahu petanya. Nah, pemetaan ini tidak harus dilakukan setiap tahun. Berdasar data, kami yakin moratorium harus dilaksanakan," tegas Mendikbud. ■

(marsif), foto: kreano/dr.

## Dibutuhkan Mekanisme Pengawasan DAK

Sekolah rusak belum menjadi prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun rusaknya fasilitas sekolah sudah terbukti membahayakan siswa. Alokasi anggaran pemerintah belum memprioritaskan perbaikan fasilitas pendidikan.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI X Ferdiansyah

“ Menurut Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah permasalahan tersebut disebabkan, luputnya pengawasan pengaturan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan. Namun yang menjadi kendala saat ini belum ada mekanisme pengawasan DAK.

"Sekarang kami sebagai Anggota DPR RI tidak bisa mengawasi, karena ini memang berasal dari APBN. Tapi APBN ini ditransfer belanja daerah dan masuk menjadi APBD. Menerima belanja daerah menjadi di kabupaten kota. Kami sebagai Anggota DPR RI dalam konteks ini belum ada mekanisme dalam konteks pengawasan," ujar Ferdiansyah di ruang rapat MKD lama Gedung Nusantara II Kamis (1/12).

Pernyataan tersebut ia sampaikan

saat *workshop* Badan Keahlian DPR RI dengan tema "Upaya Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Pendidikan". Menurut studi dari Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) yang ikut serta dalam diskusi tersebut, rata-rata 30,43 persen anggaran sudah dialokasikan untuk pendidikan. Namun rata-rata hanya mengalokasikan 0,99 persen dari APBD 2016 untuk pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP.

Melihat permasalahan di atas Ferdiansyah mengusulkan revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. "Oleh karena itu perlunya dilakukan revisi juga Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam rangka DPR RI melakukan fungsi pengawasan. Itu juga bisa merambah sampai APBD yang berasal dari APBN karena juga tidak hanya dana alokasi khusus tapi dana alokasi umum seperti gaji guru dan tunjangan guru yang ditransfer dari APBN," paparnya.

Penurunan ini sebagian besar dikontribusikan oleh penurunan DAK untuk urusan infrastruktur pada jenjang pendidikan dasar. Bahkan DAK infrastruktur untuk jenjang tingkat SMP sama sekali tidak dialokasikan. Padahal, inilah instrumen anggaran yang paling signifikan untuk membantu pemerintah daerah mempercepat penyelesaian masalah ruang kelas rusak di daerah. ■

(dita.mp) foto: Arief/br

## Maksimalkan Potensi Pariwisata untuk Pembangunan Kepemudaan

Ketua Tim Kunspek Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam mengusulkan agar Pemprov Kepri memaksimalkan potensi pariwisata untuk pembangunan kepemudaan.

“ Kepri ini menjadi salah satu destinasi yang termasuk kedalam 10 besar prioritas pemerintah pusat untuk dikembangkan menjadi sasaran wisata mancanegara. Jika pariwisata ini bisa dimaksimalkan, maka akan mendukung pembangunan sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan di sini," ujar Politisi F-Golkar itu saat memimpin Tim Kunspek Komisi X DPR RI di Kepulauan Riau, Jum'at (2/12).

Menurut Ridwan, usulan tersebut saat ini lebih baik dibanding mengharapkan tambahan dana dari APBN. Mengingat kondisi keuangan pemerintah saat ini sedang mengalami penurunan.

Untuk itu, lanjut Ridwan, Pemprov Kepri harus membuat semacam *grand design*, destinasi wisata apa yang dapat dikembangkan disini. Apalagi tadi menurut Asisten I Pemprov Kepri ada lahan sekitar 200 hektar yang bisa dikembangkan.

"Jika sudah disediakan lahannya, Pemprov Kepri bisa mendatangkan investor milik BUMN seperti PT Pengembangan Wisata (ITDC) maupun perusahaan

swasta dengan sistem profit *sharing*," ujarnya saat RDP dengan Pemprov Kepri beserta jajaran lembaga kepemudaan.

Jika pariwisata ini dapat dikembangkan, kata Ridwan, tinggal diberlakukan subsidi silang untuk sarpras ataupun kegiatan kepemudaan. Misalnya seperti Taman Mini, ada unsur daya tarik wisatawan agar banyak yang datang, tetapi juga ada sarpras untuk kegiatan pemudanya.

Oleh karenanya, Politisi Dapil Jatim V ini mengharapkan agar Pemprov Kepri memiliki konsep itu, nanti akan kita fasilitasi saat raker dengan Kemenpar. Karena sudah ada contoh BUMN PT. Pengembangan Wisata (ITDC) yang mengembangkan wisata di Bali.

Sementara itu, Asisten 1 Pemprov Kepri, Raja Azira mengatakan Potensi pemuda di Kepri ini sangat potensial, apalagi belum lama Gubernur telah melantik 1000 pemuda hafiz Qur'an.

Namun, ia menyayangkan, terutama di wilayah pesisir Kepri sarpras kepemudaan minim. Padahal berbatasan



Ketua Tim Kunspek Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam

dengan Malaysia dan Singapura. Untuk itu, perlu dibuat sarpras yang bertaraf internasional untuk meningkatkan daya saing.

Menurut Raja, sudah ada tiga program untuk pengembangan kepemudaan. Pertama, pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda. Kedua, peningkatan upaya penumbuhan wirausaha pemuda dan terakhir upaya pencegahan narkoba. ■

(dita.mp) foto: jidar/br

## Plt Sekjen DPR RI Terima Dubes Sri Lanka

Plt. Sekjen DPR RI Achmad Djuned menerima kunjungan Duta Besar Sri Lanka Dharshana Mahendra Perera di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (06/12). Kedatangan Dubes Sri Lanka tersebut terkait dengan adanya usulan ataupun keinginan untuk melakukan kerjasama antara parlemen Sri Lanka dengan DPR RI.

“ Hal ini memang sudah digagas beberapa waktu yang lalu, namun dengan diangkatnya kembali Ketua DPR RI Setya Novanto, keinginan untuk melakukan MOU atau kerjasama antar parlemen tersebut agar dapat segera dilaksanakan,” ucap Djuned.

Menurutnya, masalah ini akan dilaporkan kepada Ketua DPR RI, dan memang ada beberapa negara lain yang juga mengajukan hal yang sama. Setelah dilaporkan kepada Ketua DPR RI, baru Setjen akan mendapatkan petunjuk mengenai hal-hal apa yang harus dilakukan.

"Ketua DPR RI akan mengundang Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), karena BKSAP merupakan Alat Kelengkapan Dewan yang mempunyai tugas untuk peningkatan kerjasama antar parlemen. Sekretariat Jenderal akan menindaklanjuti apa yang menjadi kebijakan-kebijakan berdasarkan hasil pertemuan Ketua DPR RI dengan BKSAP itu," pungkasnya.■



Plt Sekjen DPR RI Achmad Juned

## Indonesia Harus Intensif dan Berkelanjutan Tangani Krisis Rohingya

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais menilai pemerintah Indonesia aktif tapi tidak intensif dan berkelanjutan terkait penanganan krisis etnis muslim Rohingya di Myanmar. Hal tersebut diungkapkannya kepada wartawan, se usai rapat internal Komisi I di Nusantara II, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

“ Krisis ini sudah berkali-kali terjadi di Myanmar. Ini merupakan problem kemanusiaan yang bukan hanya urusan negara Myanmar saja, melainkan juga problem kemanusiaan. Ini juga menyangkut negara tetangga Myanmar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang notabene merupakan negara dengan muslim terbesar di dunia tentu harus punya sikap yang jelas. Sejauh ini Indonesia sudah aktif ikut berperan dalam penanganan krisis ini. Namun aktif saja tidak cukup, harus intensif dan kontinu,” ujar Hanafi.

Beberapa pengungsi Myanmar juga telah masuk ke wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) di beberapa daerah, seperti di Medan dan Makassar. Hal itu menjadi salah satu wujud



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais

kepedulian Indonesia terhadap sesama. Namun, menurut Hanafi, langkah itu saja tidak cukup. Indonesia harus intensif dan berkelanjutan terlibat dalam perdamaian

di negara tersebut.

Indonesia memiliki sejarah yang baik sebagai mediator beberapa konflik di Asia Tenggara. Oleh karena itu dalam kasus ini, Hanafi menilai sangat legitimated jika Indonesia juga memediasi konflik di Myanmar tersebut.

"Pendekatan bilateral yang lebih intensif dan berkelanjutan kepada rezim baru Myanmar tersebut, untuk menghentikan segala bentuk pembersihan etnis rohingya di negara tersebut. Memulai dialog yang diinisiasi oleh Indonesia. Dan Indonesia pun punya *success story* menjadi mediator konflik di Asia tengara. Sehingga sudah legitimated untuk memberikan penawaran mediator tersebut," papar Politisi dari Fraksi PAN.

Jika kemudian langkah tersebut tidak membawa perubahan, Hanafi menilai satu-satunya jalan akhir yang harus diambil adalah intervensi kemanusiaan oleh tentara dan *peace building*. Cara itupun harus disepakati oleh ASEAN, dan organisasi-organisasi negara Islam lainnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan mengadukannya kepada PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa).■

## Komisi IV DPR RI Sambangi Bali Elephant Camp

Saat melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Bali, Tim Kunspek Komisi IV yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV Edhy Prabowo, berkesempatan menyambangi wahana konservasi Bali *Elephant Camp* yang telah berhasil menangkarkan gajah.

“Sebuah apresiasi disampaikan anggota Komisi IV DPR RI Hengky Kurniadi, yang menyambut gembira atas kelahiran anak gajah di wahana konservasi tersebut.

"Kami sudah beberapa kali mendarangi taman nasional yang ada di Bali Barat, namun di sana kami belum menjumpai hal seperti yang ada disini. Kami sangat gembira melihat perkembangan gajah yang sudah berhasil ditangkarkan," ucap Hengky

disela-sela acara kunspek di Bali, Kamis (01/12).

Hal ini menurutnya dapat menciptakan keberlanjutan dan kelangsungan hidup bagi satwa-satwa itu dengan lebih terawat. "Ini dapat menjadi sebuah stimulus, agar daerah-daerah lain juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan di Bali *Elephant Camp*," ujarnya.

Hengky menyatakan, setiap manusia harus menjaga ekologi dengan cara



Tim Kunspek Komisi IV dipimpin Ketua Komisi IV Edhy Prabowo menyambangi wahana konservasi Bali *Elephant Camp*.

sedemikian rupa, karena menjaga ekologi sangat penting manfaatnya bagi masa depan kita." Mencintai flora dan fauna merupakan suatu keharusan, karena keduanya juga bagian yang tidak terpisahkan sebagai penghuni bumi ini," pungkasnya. ■

(dep.mpr) Foto: Ryan/br

## PT Jasindo dan RS Harus Miliki Rekam Medis

Tim Kunker Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI mengunjungi Rumah Sakit (RS) Siloam Palembang, Sumatera Selatan dalam rangka pengawasan pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. Mereka meninjau fasilitas, pelayanan, dan koordinasi dengan PT. Jasindo selaku *provider* di Palembang, Kamis (1/12).

Tim Kunker BURT yang dipimpin Wakil Ketua Novita Wijayanti (F-Gerindra) setibanya di RS Siloam disambut oleh Direktur RS Dr. Harijanto Solaeman, MM untuk menggelar pertemuan.

Novita menyebutkan bahwa RS Siloam sudah berjalan baik. "Kita sudah lihat bagaimana fasilitas dan pelayanan RS ini sudah berjalan baik. Selain Siloam kami juga sudah lihat beberapa RS lainnya yang sudah kerjasama dengan PT Jasindo," ujarnya.

Selain kerjasama dengan DPR RI, PT Jasindo pun sudah bekerjasama dengan MPR RI, Kementerian dan lembaga lain, sehingga harus bisa memaksimalkan pelayanan karena pertolongan pertama untuk pasien sangatlah dibutuhkan.

"Saya lihat sangat baik dan representatif pelayanan di sini. Kita juga



Tim Kunspek BURT DPR RI dipimpin Wakil Ketua Novita Wijayanti

sudah lihat beberapa alat dan juga kamar yang sudah ada seperti *President Suite Room* dan *VVIP Room*. Kami menilai sudah sangat baik untuk memberikan pelayanan awal orang yang terkena musibah sakit," terang Novita.

Dia juga berharap RS ini tidak hanya melayani pejabat negara dengan baik tetapi juga bisa melayani warga umum dengan

baik pula agar tidak adanya kecemburuan sosial. Sehingga semuanya dapat terlayani dengan baik sehingga tidak perlu berobat keluar negeri karena di Indonesia pun sudah banyak rumah sakit yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM), pelayanan dan alat yang sangat bagus.

Selain itu, politisi Gerindra asal Jateng ini juga berharap, standar pelayanan mesti terus diperhatikan. "Pelayanan perawat dan dokter harus terus dijaga dengan baik, jangan sampai ada salah diagnosa terhadap suatu penyakit lalu juga kualitas kebersihan ruangan mesti selalu dijaga," tuturnya.

Kepada PT. Jasindo yang berperan sebagai *provider* juga harus memiliki kinerja yang bagus. "Kita tadi memberikan masukan bagaimana supaya *database* seluruh anggota keluarga itu maksimal. Jasindo harus punya rekam medis sekeluarga sehingga penanganannya cepat," tegasnya.

Kunjungan Kerja ini juga diikuti oleh Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso (F-PD), Rendy Lamadjido (F-PDIP), Andi Fauziah dan Sri Meliyana (F-PG), Muslim (F-PD), Agus Sulistyono (F-PKB) dan Ansory Siregar (F-PKS). ■

(dep.mpr) Foto: Iyand/br

## Rumuskan Formula Sanksi Administratif dan Pidana Dalam UU

Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI menggelar seminar yang mengangkat tema "Kaidah Perumusan Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang." Masalah tersebut senantiasa menjadi salah satu perdebatan didalam setiap pembahasan RUU, baik pada saat penyusunan di lingkungan DPR RI maupun lingkungan pemerintah, dan juga pada saat pembahasan dilingkungan DPR RI bersama dengan pemerintah.

“ Melalui tema yang diusung dalam seminar ini, kami mengharapkan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki, yaitu mendapatkan pandangan dan masukan secara komprehensif dari para pakar pidana, pakar hukum administrasi negara. Agar dapat memperdalam pengetahuan para peserta seminar mengenai hukum pidana, hukum administrasi negara, formula sanksi administratif, formulasi sanksi pidana, dan ppidanaan dalam UU," ucap Kepala BKD Johnson Radjaguguk saat memberikan pengantar dalam seminar tersebut, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (06/12).

Johnson mengatakan, Badan Keahlian telah memberikan dukungan kepada Alat Kelengkapan Dewan dan juga kepada Anggota DPR RI, diantaranya yaitu menyiapkan program legislasi nasional baik yang sifatnya lima tahunan maupun yang prioritas tahunan.

"BKD juga menyiapkan naskah akademik RUU dan draf awal RUU. Badan ini juga melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan APBN, serta berbagai kegiatan penelitian. Yang semuanya dalam kerangka memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI," paparnya.

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, lanjut Johnson, perlu ada suatu standar.

Ia juga menjelaskan, kaidah perumusan sanksi administratif dan sanksi pidana telah diatur secara teknis dalam lampiran 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011, namun belum diatur dengan tegas dan menjadi perdebatan.

"Parameter menentukan sanksi administratif dan sanksi pidana, baik penjara ataupun denda, sehingga dalam perumusan norma Peraturan Perundang-undangan menyebabkan ada kesulitan bagi pembentuk



Suasana seminar yang digelar BKD DPR RI

UU dalam menentukan sanksi yang akan dikenakan. Terutama berkaitan dengan besarnya ancaman yang hendak dikenakan terhadap pelanggaran hukum itu sendiri," ungkapnya.

Johnson menyampaikan, sanksi administratif dan sanksi pidana merupakan salah satu bagian terpenting di dalam Peraturan Perundang-undangan, khususnya

UU. Terkait dengan penegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran atau ketidak patuhan terhadap UU, melalui sanksi administratif, dimaksudkan agar pembuat perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sehingga sanksi administratif merupakan instrumen yuridis yang bersifat preventif dan represif non yudisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran.

"Sehingga dalam UU

perlu dimuat, agar pejabat administrasi negara dapat mengeksekusinya secara langsung. Sanksi baik yang bersifat administratif maupun pidana dapat juga dikatakan sebagai alat kekuasaan atau langkah represif, yang dapat dipergunakan pemerintah untuk memaksakan kepatuhan masyarakat, menciptakan ketertiban serta ketenteraman," pungkasnya. ■

(dep), foto: jay/bk.

## Dewan Janji Bahas Moratorium UN Dengan Mendikbud

Komisi X DPR RI berjanji akan melakukan dialog dan melanjutkan pembahasan terkait Moratorium Ujian Nasional (UN) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

**H**al tersebut disampaikan Ketua Tim Kunjungan Spesifik Bidang Kepemudaan Komisi X DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Mujib Rohmat menanggapi pertanyaan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Muh. Suruji.

"Kami akan melakukan dialog dan pembahasan lebih lanjut di Komisi X terkait Moratorium UN ini," tegasnya saat pertemuan tim dengan Sekda NTB dan jajarannya, di Mataram, Jumat (02/12)

Mujib menilai kebijakan pemerintah tersebut begitu tiba-tiba. "Ini sesuatu yang tiba-tiba, yang muncul di tengah-tengah seperti ini," paparnya.

Sebentar lagi, lanjutnya, akan ada ujian akhir semester di akhir belajar mereka

## Komisi IV Serap Aspirasi Nelayan Kalbar

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2/2015 yang melarang penggunaan alat tangkap, ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik, membuat polemik di tengah-tengah nelayan. Mereka mengeluhkan terbitnya Permen tersebut akan membunuh mata pencaharian mereka sebagai nelayan terutama mengurangi jumlah tangkap mereka. Pasalnya, sebagian besar alat tangkap para nelayan masih memakai arad yang jelas-jelas dilarang dalam peraturan tersebut.

“Menyikapi polemik Permen No.2 tahun 2015 ini, Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI menyerap langsung aspirasi nelayan Kalimantan Barat di TPI Pasar Sungai Kakap, Kamis (01/12). Sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan dalam pertemuan tersebut bahwa kedatangan Tim Komisi IV ke Kalimantan Barat untuk menyerap aspirasi Nelayan terkait dengan polemik Permen KP No.2/2015, dimana Permen tersebut akan mulai berlaku pada 1 Januari 2017.

"Komisi IV DPR RI hadir disini untuk memastikan bahwa jangan sampai nanti mulai tanggal 1 Januari 2017, nelayan Kalimantan Barat tidak bisa melaut karena berlakunya Permen tersebut," ungkap Daniel.

Lebih lanjut, Daniel berharap sebelum tanggal 1 Januari 2017, Pemerintah sudah harus bisa memberikan jalan keluar atas permasalahan ini terutama bagi nelayan-nelayan yang terkena dampak.

"Komisi IV DPR RI telah melakukan



Tim Kunker Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Daniel Johan serap aspirasi nelayan Kalbar

rapat dengan Kementerian KP maupun Kemenko Maritim, dimana salah satu hasil kesimpulan rapat tersebut adalah yakni Komisi IV DPR RI menolak adanya Permen KP No.2/2015 dan meminta untuk dicabut atau direvisi," ungkapnya.

Untuk diketahui bahwa sampai saat ini masih banyak nelayan memakai alat

tangkap seperti arad, tancap, bondet, dan lain-lain. Sedangkan tahun ini merupakan tahun terakhir sebelum penerapan total Permen KP No 2/2015 itu, sementara tidak semua ikan bisa ditangkap hanya dengan menggunakan jaring atau sejenisnya.

Sebagaimana disampaikan masyarakat Nelayan Kalbar dalam pertemuan dengan Komisi IV DPR RI bahwa, nelayan merupakan profesi yang menjadi tumpuan hidup sehari-hari mereka. Jika jumlah tangkapan mereka menurun maka akan berdampak pada perekonomian keluarganya. ■

(skr), foto : aningsib/br.



Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat

di semester satu tahun ajaran 2016-2017, kemudian kebijakan ini muncul, apakah

tidak akan terseok-seok hal ini?, tanya Mujib.

Menurutnya, suatu kebijakan itu perlu dimatangkan terlebih dahulu baru dikeluarkan. Kebijakan apapun itu, tegas politisi Dapil Jawa Tengah ini, harus berdasarkan mekanisme cara-cara yang baik.

"Sesuatu yang baik itu harus berdasarkan mekanisme yang baik. Oleh karena itu dialog dan pembicaraan di Komisi X akan dilanjutkan," mantap Anggota Dewan dari Fraksi Golkar ini.

Sebagaimana diketahui, pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berencana memorandum UN jika disetujui Presiden dan sebagai gantinya akan dilaksanakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).

Pemerintah mengklaim saat ini persiapan USBN sudah mencapai 70 persen.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi NTB Muh. Suruji menyatakan daerah tidak ada masalah dengan Ujian Nasional (UN). "Tapi mengapa ini begitu mendadak. Ini harus dipikirkan," katanya.

Ia menyatakan, sebaiknya mekanisme pengambilan kebijakan dilakukan dengan cara yang lebih bijak.

Senada dengan hal tersebut, Ketua KNPI NTB menyatakan tidak setuju jika UN dihapus. Kalau dihapus, ia menanyakan standar kompetensi apa yang akan dipakai. ■

(sk), foto : suaitati/br.

## Subsidi Listrik Dicabut, Rakyat dan UMKM Semakin Terpuruk

Menyusul pencabutan subsidi listrik oleh pemerintah, rakyat miskin dan para pelaku UMKM termasuk IMKM akan semakin terpuruk. Ini sangat ironis di tengah penggunaan energi batubara yang sangat murah oleh PLN dalam memproduksi listrik. Apalagi, Indonesia kaya dengan energi geothermal (panas bumi) yang hingga kini belum termanfaatkan dengan maksimal.

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono sangat memperhatikan kebijakan pemerintah ini, saat dihubungi Senin (5/12). Dengan menggunakan energi batubara mestinya harga listrik bisa diturunkan 70-80 persen, karena ongkos produksi PLN lebih murah. "Ini sebenarnya ironis, mengapa malah jadi naik. Bahkan, menghilangkan subsidi. Subsidi silang mestinya bisa dilakukan PLN dengan keuntungan yang didapat dari hasil penjualan," ungkap Bambang.

Dan yang paling terkena dampaknya adalah rakyat kecil dan sektor U M K M . Dengan kenaikan ini



Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono

dipastikan UMKM akan menaikkan harga produknya, karena listrik jadi sumber daya penting dalam produksi. Akibatnya, daya beli masyarakat terhadap produk UMKM juga merosot. "Padahal, UMKM diharapkan mampu mendukung ekonomi kerakyatan atau ikut menumbuhkan perekonomian nasional," ujar politisi Partai Gerindra ini.

Seperti diketahui, pemerintah telah memperluas pencabutan subsidi listrik dari semula untuk pelanggan golongan 1.300 volt ampere (VA) ke atas, kini merambah ke golongan tarif 900 VA. Rencananya, kenaikan tarif listrik bagi golongan pelanggan 900 VA dilakukan secara bertahap selama tiga kali, mulai Januari, Maret, dan Mei 2017. Masing-masing kenaikannya sebesar 32 persen.

Pada Januari 2017, tarif listrik akan naik dari sebelumnya Rp585 per KWh menjadi Rp774 per KWh per Januari. Tarif akan terus meningkat menjadi Rp1.023 per KWh pada Maret dan menjadi Rp1.352 per KWh pada Mei. Jadi, kenaikan ini sekitar 131 persen. Melihat kenyataan ini, Bambang mengatakan, pemerintah tak menyadari

dampaknya yang sangat luas bagi rakyat kecil dan sektor UMKM maupun IMKM. Padahal, UMKM dan IMKM juga sudah dibebani pajak yang besar.

Bagi rakyat kecil, kebutuhan terhadap listrik sama dengan kebutuhan terhadap beras. Di mana pun masyarakat pasti butuh listrik. "Terus terang saya prihatin sekali dengan kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini," keluh politisi dari dapil Jatim I ini. Bambang juga menjelaskan, selama ini listrik Indonesia termahal di ASEAN dengan USD 11 sen/KWh. Di Malaysia USD 5 sen, Singapura USD 6 sen, Thailand 5 USD 5 sen, dan Philipina 6 sen.

Lebih ironis lagi, ketika energi terbarukan seperti geothermal (panas bumi) belum termanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan listrik nasional. Padahal, dari potensi geothermal dunia, 45 persennya ada di Indonesia. Bila kelak energi geothermal bisa dieksplorasi dengan maksimal, bisa menurunkan harga listrik bagi kebutuhan rumah tangga dan industri kecil di Tanah Air. ■

(mb), foto: ranni/hr.

## Delegasi DPR RI Lakukan Pertemuan Bilateral Dengan Iran

Di sela-sela sidang APA ke-9 di Siem Reap, Kamboja, Delegasi Parlemen Republik Indonesia melalui Wakil Ketua BKSAP Juliari P Batubara, Kamis kemarin (1/12) berkesempatan melakukan pertemuan bilateral dengan Delegasi Parlemen Islam Iram Fatima Zolghadr selaku Ketua Parlemen.

“Iran mengapresiasi Indonesia pada bahwa disetiap forum pertemuan internasional, atas beberapa resolusi-resolusi yang menurut Iran memberatkan Iran, dan kita (Indonesia) *againts* daripada resolusi-resolusi tersebut, dan tentunya Iran berkepentingan juga untuk bekerjasama dengan Indonesia karena dua negara yang mayoritas penduduknya muslim dan juga negara yang sama-sama memiliki demokrasi yang bisa menunjukkan kepada dunia *international* bahwa demokrasi juga bisa di terapkan di negara yang mayoritas penduduknya

Islam," terang Juliari kepada Parlemenaria.

DPR RI menurut Juliari, memandang Republik Islam Iran punya posisi yang sangat strategis dimana mereka juga merupakan negara besar di bagian timur sari Adia dan negara yang mempunyai sejarah panjang dengan Indonesia.

"Oleh karena itu kita mengharapkan, tidak hanya antar Parlemen tetapi antar pemerintah kedua negara juga kedepannya bisa memiliki agenda-agenda dan program kerja yang komplit," tambah Juliari yang

politisi dari Fraksi PDIP.

Sebelumnya dalam pertemuan, *Head of the Iranian Islamic parliament* Fatima zolghadr menyampaikan, Iran dan Indonesia merupakan negara berpengaruh di dunia Islam dan Iran mengapresiasi kedua negara untuk saling mendukung di setiap forum-forum internasional, serta pentingnya penguatan kerjasama antar parlemen di kedua negara, apalagi kedua parlemen mempunyai *group friendship*.

"Iran dan Indonesia sangat kuat dan merupakan negara yang sangat berpengaruh bagi regional di kawasan

masing-masing.

Kedua negara juga diharapkan bisa mengadopsi resolusi-resolusi penting seperti resolusi tentang pemberantasan terorisme, ekstrimisme, dan radikalisme," ujar Fatima.

Ia pun berharap, kedua negara dapat meningkatkan dan mengembangkan kerjasama dibidang budaya, serta disektor keuangan dan perbankan.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Indonesia yang terus memberikan dukungan-dukungan terhadap resolusi-resolusi, khususnya resolusi yang merugikan

Iran," lanjutnya.

Usai pertemuan, Delegasi DPR RI memberikan cenderamata berupa Wayang Golek kepada delegasi Iran.

Delegasi DPR RI dalam sidang APA ke-9 kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP Juliari P Batubara, serta anggota BKSAP Dave Akbarshah Fikarno (F-PG), Sartono (F-PD), dan M. Arief Suditomo (F-Hanura). ■



Wakil Ketua BKSAP, Juliari P. Batubara menerima Delegasi Parlemen Iran

## Komisi II Harapkan Pengamanan Pilkada Ditingkatkan

Komisi II DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Mendagri Tjahjo Kumolo, MenPAN-RB Asman Abnur, Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Waluyo, Ketua Bawaslu Muhammad, Anggota KPU Hadar Nafis Gumay serta Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Lutfi Lubihanto meminta pengamanan pilkada itu penting untuk ditingkatkan.

“Kita bahas pengamanan pilkada.

Tentu aparat keamanan harus siap," kata Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman saat membuka Raker di Ruang Komisi II, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa sore (06/12). Menurutnya, koordinasi diantara aparat keamanan merupakan keniscayaan, khususnya terkait deteksi dini.

Politisi Golkar ini menambahkan, pengamanan pilkada harus dilakukan antara aparat keamanan, Pemda serta penyelenggara pemilu. "Koordinasi tidak hanya antara aparat keamanan juga dengan

pemerintah daerah (pemda), Bawaslu serta KPU," ujar Rambe di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Mendagri Tjahjo Kumolo dalam kesempatan itu mengatakan bahwa Bawaslu sudah memiliki peta kerawanan dan akan segera dikoordinasikan dengan lembaga yang berwenang untuk diantisipasi. "Bawaslu sudah punya peta kerawanan, kepolisian juga, kami di Kemdagri (Kementerian Dalam Negeri) juga ada. Memang kita tidak bisa prediksi daerah-daerah mana yang pasti nanti timbul potensi kerawanan," ujar Tjahjo.

Pada kesempatan yang sama, Kabaintelkam Komjen Lutfi Lubihanto mengatakan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sangat memberikan atensi pelaksanaan pengamanan tingkat daerah.

"Kalau di pusat sudah ada komunikasi, komitmen untuk dilaksanakan dengan baik," kata Lutfi.

Lutfi mengemukakan, pihaknya memiliki 10 indikator kerawanan seperti kesiapan penyelenggara pilkada, sejarah konflik, potensi konflik pasangan calon (paslon),

keberadaan pengurus partai politik (parpol) yang ganda serta karakteristik masyarakat.

Dia mengungkapkan, pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di rumah sakit, panti-panti sosial, lembaga pemasyarakatan pola pengamanan 2-2-1. "Dua anggota Polri, dua Linmas, 1 TPS. Sedangkan TPS aman pola pengamanannya 2-10-5, TPS rawan satu 2-4-2, TPS rawan dua 2-2-1. Tingkat PPS ada 10 personil, PPK 15 personil, KPU kabupaten/kota 30 personil, KPU provinsi 100 personil, KPU dan Bawaslu pusat 30 personil," ungkapnya.

Lutfi menyatakan, keberhasilan pengamanan pilkada memang bergantung pada aspek koordinasi dan sinergitas polri dengan unsur terkait di antaranya KPU, Bawaslu, parpol, paslon, pendukung, pemda, media dan pengawas pemilu independen.

Mengenai penyelenggaraan pilkada 2017, Komisi II nantinya juga akan terus berkoordinasi dengan lembaga terkait guna mendorong penyelenggaraan pilkada berlangsung sesuai peraturan perundang-undangan. ■



Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman

## Dua Demonstrasi Besar dan Sangkaan Makar Jadi Sorotan Komisi III dan Polri

Komisi III DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi, Benny K Harman menggelar rapat kerja dengan jajaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian. Dalam pembahasan rapat DPR RI dan Polri menyoroti dua isu besar demonstrasi penegakan hukum kasus penistaan agama dan indikasi upaya makar oleh sekelompok orang.

**M**eskipun secara umum Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja Polri dalam pengamanan dua kali demonstrasi 4 November dan 2 Desember 2016 namun, tetap memberikan catatan penting sebagai tugas DPR RI mengawasi dan mengevaluasi kinerja penegakan hukum. Dalam hal demonstrasi, Komisi III menekankan kepada Polri agar tetap mengutamakan langkah-langkah pencegahan kerusuhan.

"Komisi III DPR RI mendesak Kapolri agar lebih mengedepankan langkah preventif untuk mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat," ujar Benny di ruang sidang Komisi III, Senin (5/12) sore.

Menurutnya langkah preventif berguna menjaga ketertiban dan keamanan nasional demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Komisi III DPR RI juga memperingatkan Polri secara tegas agar menghindari penanganan kasus secara represif terhadap kelompok yang melakukan aksi unjuk rasa yang sesuai aturan hukum, sebagai wahana penyampaian aspirasi dan hak menyatakan pendapat di muka umum, karena dalam demokrasi unjuk rasa dijamin konstitusi.

Komisi III DPR RI juga mempertanyakan tentang penangkapan 11 orang dengan tuduhan makar dan pelanggaran atas pasal dalam UU ITE. Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo beranggapan, pernyataan makar yang disampaikan Polri terhadap 11 tersangka yang ditangkap jelang aksi 2 Desember pekan lalu, agak sensitif dalam konteks perpolitikan nasional dan berpotensi mengganggu perekonomian.

Saat rapat juga dipertanyakan apakah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 11 orang tersebut tergolong tindakan makar. Sebab, mereka hanya mengungkapkan pernyataan, bukan melalui perbuatan. Bambang menjelaskan, ada beberapa syarat makar yang tak terpenuhi dalam konteks ini,

di antaranya, karena kekuatan pemerintah di parlemen sangat kuat dan tak ada gerakan-gerakan tertentu di kampus-kampus.

Agar tidak ada yang merasa dikriminalisasi, Komisi III DPR RI mendesak Kapolri untuk bersungguh-sungguh menjaga netralitas dan profesionalisme dalam penegakan hukum.

"Terhadap perkara yang tidak cukup bukti dalam perkara tindak pidana agar segera dihentikan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga masyarakat. Sebaliknya terhadap perkara yang sudah cukup bukti, Polri tidak segan-segan untuk menyelesaikannya," tandas Benny memimpin sidang komisi.

Namun Tito berargumen penangkapan 11 orang yang disangka makar merupakan upaya penyelamatan aksi damai yang digelar sebagian besar umat Islam, karena dikhawatirkan niat mulia sebagian besar muslim dinodai oleh sekelompok orang tak bertanggung jawab. Dia mengungkapkan upaya sejumlah aktivis menduduki DPR RI dengan mengerahkan massa aksi 2 Desember gagal total.

"Kami melihat ada upaya pengerahan massa ke DPR RI dengan agenda politik lain. Kami antisipasi. Seperti yang dilihat, aksinya berlangsung damai, tidak ada pengerahan massa. Itu gagal total," ujar Tito di ruang Komisi III DPR RI menanggapi pertanyaan.

Tito mengatakan ada upaya dari pelaku makar untuk membelokkan keramaian massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI untuk menduduki gedung DPR dan MPR RI. Namun, kepolisian, menurutnya, sudah tahu upaya



Suasana usai raker Komisi III dengan Kapolri

tersebut dan menangkap 11 terduga pelaku teror ini.

"Kami tidak ingin aksi para ulama dan umat muslim ditanggung oleh agenda politik selain memproses hukum Ahok. Kami sudah bangun dialog dengan GNPF MUI, dan komit untuk proses hukum Ahok," papar Tito. ■

(eko)/foto:arif/br

## DPR RI ingin Seluruh RS Berikan Pelayanan Cepat

Tim BURT DPR RI mengunjungi Rumah Sakit (RS) Siloam Palembang, Sumatera Selatan dalam rangka pengawasan pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi anggota DPR RI, Presiden dan Petinggi Negara lainnya beserta keluarga. Tim meninjau langsung fasilitas, pelayanan dan koordinasi dengan PT Jasindo selaku provider, Kamis (1/12) lalu.

## Perkembangan Perdagangan Koral Harus Diawasi

Aktivitas perdagangan terumbu karang untuk kebutuhan akuarium hias, sebagian besar terjadi di Bali. Masih maraknya aktivitas perdagangan terumbu karang tersebut, mengundang perhatian Komisi IV DPR RI untuk melakukan kunjungan spesifik ke Bali, guna melihat masalah konservasi di Provinsi tersebut.

“Koral berkembang pesat, namun tetap harus diawasi. Karena pengusaha koral ada juga yang nakal, meski memiliki penangkaran dan budi daya, namun secara diam-diam masih tetap mengambil di alam. Tempat budi daya koral yang dikunjungi oleh Komisi IV DPR RI ini, sudah termasuk yang bagus dan sukses,” ucap Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro usai mengunjungi Budidaya Koral di PT. Dinar Darum Lestari, di Bali, Jum'at (02/12).

Darori mengatakan, praktik jual beli terumbu karang yang diambil dari laut atau terumbu karang liar merupakan aktivitas negatif yang merugikan laut Indonesia. Ekspor terumbu karang hingga saat ini masih terus terjadi, dan Kementerian LHK adalah pelaksana regulasi untuk pemeliharaan dan



Tim Kunker Komisi IV DPR RI meninjau Budidaya Koral PT. Dinar Darum Lestari, di Bali

pengembangan terumbu karang di Indonesia.

"Jika tidak ada langkah penanganan lebih serius dari Pemerintah, perdagangan koral hias akan semakin masif dan itu berdampak pada ekosistem pesisir yang menjadi tempat berkembang biak terumbu karang. Kunjungan Komisi IV DPR RI

ini bertujuan menyerap masukan terkait adanya revisi UU tentang Konservasi," ujarnya.

Menurutnya, jika ekosistem pesisir sudah rusak, ada resiko besar yang akan dihadapi oleh Indonesia. Yakni tersendatnya berkembangbiakan sumber daya ikan yang ada di laut. Apabila itu terjadi, maka ancaman penurunan produksi perikanan dan kelautan sudah pasti akan dihadapi Indonesia.

"Perdagangan koral alam sudah dilarang, dan budi daya koral di wilayah Provinsi Bali saat ini sudah cukup banyak. Di negara-negara Eropa dan Amerika, koral hias sedang menjadi primadona. Secara status sosial disana, kalau mereka sudah memelihara koral, maka termasuk dalam golongan yang mampu dan bahagia," pungkasnya. ■

(dep.mp), foto : ryan/hr.



Tim Kunspek BURT DPR RI mengunjungi Rumah Sakit Siloam Palembang

Anggota BURT Sri Meliyana menyebutkan bahwa petinggi negara berhak mendapatkan pelayanan yang baik, "BURT mewakili semua anggota DPR RI ingin

mendapatkan hak jaminan kesehatannya ketika mengalami sakit terutama saat sedang berkunjung ke suatu daerah mengingat banyaknya kunjungan anggota dewan," terangnya.

Pelayanan yang baik dan kecepatan menjadi hal yang perlu ditingkatkan karena semakin cepat ditangani, pasien juga akan cepat tertolong. Selain itu juga pasien akan lebih tertolong dengan transportasi yang digunakan mesti sesuai dengan kondisi perjalanan selama mengantar jemput pasien.

"Keterbatasan transportasi masih menjadi salah satu sorotan juga mengingat banyaknya wilayah-wilayah yang berada di pedalaman seperti contohnya di Samarinda

yang melewati sungai-sungai, sehingga perlu pasien bisa ditolong dengan helikopter," ungkap politisi dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Menurut ia Rumah Sakit Siloam Palembang sendiri telah memiliki pelayanan yang bagus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh PT Jasindo mulai dari kamar dan alat-alat kesehatan yang sudah cukup lengkap. Tidak hanya di RS Siloam, diharapkan semua rumah sakit juga dapat menangani dengan baik dan cepat khususnya para pejabat negara.

Kunjungan Kerja ini juga diikuti oleh Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso (F-PD), Rendy Lamadjido (F-PDIP), Andi Fauziah (F-PG), Novita Wijayanti (F-PG) dan Muslim (F-PD), Agus Sulistyono (F-PKB) dan Ansory Siregar (F-PKS). ■

(day.mp), foto : Jayadi/hr.

## Komisi III Desak Jaksa Agung Jaga Independensi dan Integritas

Rapat Kerja Komisi III DPR RI, Selasa (6/12), yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Desmond J Mahesa bersama dengan jajaran Jaksa Agung HM Prasetyo memberikan arahan kepada lembaga Adhyaksa ini agar menjalankan tugas secara mandiri. Saran tersebut bertujuan supaya meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas lembaga penegak hukum di mata publik.

“Komisi III DPR RI mendesak Jaksa Agung agar menjaga dan meningkatkan konsistensi dan independensi dalam penanganan kasus, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat sehingga dapat meningkatkan citra kejaksaan yang profesional dan akuntabel di mata masyarakat,” papar Desmon membacakan kesimpulan raker di ruang sidang Komisi III.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mengatakan, selama ini Jaksa Agung HM Prasetyo hanya baik dalam paparan program, tapi tidak dalam praktiknya. Politikus Partai Gerindra ini menilai Prasetyo secara personal lemah dalam hal integritas sumber daya manusia (SDM) dan terkadang tidak serius menangani kasus. Pernyataan itu terbukti dari ketidakcermatan dalam tuntutan dan dakwaan.

"Masalahnya pada integritas orang-orang di dalamnya. Kelihatan jaksa ini bermain-main dalam tindak pidana, misalnya meringankan tuntutan masa tahanan," ujar Desmon.

Kasus penistaan agama dengan tersangka Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga menjadi perhatian khusus dalam raker kali ini, pasalnya perkara ini

menarik perhatian masyarakat. Berbagai komentar pun disampaikan oleh sejumlah Anggota Dewan. Dipertanyakan kepada Jaksa Agung HM Prasetyo perihal



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa

pelimpahan berkas tersangka Ahok yang super cepat hingga ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut).

"Dalam kasus Pak Ahok, kita lihat proses yang begitu cepat. Seolah terdapat kejahatan luar biasa. Apakah ini kejahatan luar biasa seperti halilintar di siang bolong? Apakah Kejaksaan takut?" ungkap Wakil Ketua Komisi III dari F-Demokrat, Benny K Harman yang mendampingi Ketua Sidang.

Anggota Komisi III DPR RI dari F-PDI Perjuangan, Junimart Girsang juga melemparkan pertanyaan soal Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam kasus Ahok. Dia berharap tidak ada

tekanan dari kejaksaan dalam proses hukum kasus Ahok.

"Kasus Ahok, apakah jaksa sudah menerima SPDP, karena SPDP wajib. Dalam perkara Ahok, apakah sudah dilakukan. Saya harap proses ini tidak ada *pressure*. Yang saya tanyakan apakah ada SPDP?" tanya Junimart.

Menanggapi hal tersebut, Prasetyo mengungkapkan bahwa tidak ada tekanan dari pihak manapun. Pelimpahan perkara ke pengadilan dilakukan dengan cepat dan tepat sesuai KUHP.

"Menegenai alasan mengapa penanganan masalah Ahok super cepat, percayalah tim melakukan dengan penuh kesungguhan tanpa ada tendensi dari pihak manapun.

Jadi tidak ada sama sekali latar belakang apapun, jadi supaya cepat terselesaikan," ungkap Prasetyo.

Selain membahas soal kasus-kasus faktual, Prasetyo juga akan memberikan sejumlah laporan kepada komisi bidang hukum tersebut. Termasuk soal target dari Kejaksaan Agung ke depan.

Di akhir rapat Komisi III DPR RI juga mendesak Jaksa Agung untuk lebih mengoptimalkan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) dalam melakukan pengawasan internal terhadap aparaturnya Kejaksaan RI guna menciptakan institusi Kejaksaan yang kredibel dan akuntabel. ■

(eko), fotoanief/br

## Bibit Wirausahawan Muda Diharapkan Tumbuh

Komisi X DPR RI berharap bibit para wirausahawan muda bisa tumbuh efektif dan efisien di berbagai daerah. Walau anggaran program wirausahawan pemula sangat minim, tapi hendaknya tidak menutup kreatifitas pemuda.

Demikian disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Yayuk Sri Rahayuningsih

saat memberi sambutan di hadapan organisasi pemuda di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (2/12). Ia

mengungkapkan, anggaran Kemenpora 2017 sebesar Rp3,1 triliun.



Anggota Komisi X DPR RI Yayuk Sri Rabayuningsih

Dari alokasi anggaran tersebut hanya Rp46,23 miliar untuk program wirausaha pemula. "Anggaran sebesar ini tidak banyak. Namun demikian, yang kita harapkan adalah efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program ini, sehingga dapat menghasilkan bibit-bibit wirausahawan muda," jelas Yayuk

Ditambahkan politisi Nasdem ini, para wirausahawan muda akan banyak menghadapi persaingan ketat, baik di dalam negeri maupun global. Apalagi, kini sudah memasuki era persaingan pasar ASEAN dalam MEA.

"MEA memiliki konsekuensi yang cukup berat, antara lain adanya pasar tunggal dan kesatuan basis produksi di ASEAN berupa dampak aliran bebas barang, arus bebas jasa, arus

bebas investasi, arus bebas tenaga kerja terampil, dan arus bebas modal," papar Yayuk lagi.

Sementara itu, sebelumnya Asisten III Pemprov Kalteng mengungkapkan, fakta terkini kondisi ke p e m u d a a n K a l t e n g memperlihatkan, ada 0,23% angka buta huruf pemuda. Lalu masih ada 8,36% pengangguran terbuka pemuda di Kalteng.

Melihat fakta ini, pembangunan suprastruktur jadi keniscayaan, seperti membangun kepemudaan, sosial, dan kewirausahaan. Namun, ada juga yang membanggakan dari para pemuda Kalteng. Setidaknya ada empat pemuda yang ikut dalam program pertukaran pemuda internasional. Negara diharapkan mampu mengelola aset pemuda secara maksimal. ■

(mb) foto: banten/br

## Komisi IV Nilai Permen KP Nomor 2/2015 Resahkan Nelayan

Permen Nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seinen Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia akan mulai berlaku pada 1 Januari 2017. Para nelayan terus mengeluhkan akan diberlakukannya Permen tersebut, di sisi lain Pemerintah belum memberikan solusi atas penerapan Permen tersebut.

Sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan saat bertemu Masyarakat nelayan Kalbar, Kamis (01/12) bahwa Permen KP Nomor 2/2015 berdampak pada kegiatan nelayan, dalam Permen tersebut terdapat 17 jenis alat tangkap yang dilarang.

"Informasi dari Jateng, Jatim dan Banten pada bulan November 2016 terdapat 38 ribu kapal menyangkut 760 ribu orang nelayan yang terkena dampak, belum termasuk Jabar dan Kalimantan," ungkap Daniel.



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan saat bertemu Masyarakat nelayan Kalbar

"Kebijakan ini telah menimbulkan kerugian secara ekonomi dan sosial sejumlah Rp3,4 triliun serta akan menimbulkan pengangguran sebanyak 66.621 orang hanya di Jawa Barat,

sedangkan di Kalimantan Barat, informasi yang kita peroleh bahwa ada 3.982 kapal yang tidak bisa melaut," ungkapnya.

Ditegaskan Daniel, bahwa Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum kepada nelayan yang terkena dampak Permen KP Nomor 2/2015 untuk dapat tetap melakukan operasi penangkapan ikan.

Saat pertemuan dengan nelayan Kalbar di TPI Pasar Sungai Kakap

Pontianak, Daniel Johan tegaskan bahwa jangan sampai ada nelayan Kalbar yang tidak bisa melaut atau dipenjara mulai tanggal 1 Januari 2017 nanti. ■

(str) foto: singgih/br

# Shortfall Penerimaan Perpajakan Berisiko Bagi Keuangan Negara

Anggota Komisi XI DPR RI yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam menilai realisasi penerimaan perpajakan yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan di APBN (shortfall) pada tahun 2016 ini, akan berisiko bagi keuangan negara.

Kondisi tersebut, jelas Ecky, membuat kondisi keuangan menjadi mengkhawatirkan karena realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir tahun dinilai hanya kurang dari 85 persen dari target di APBN.

"Kalau kita lihat perkembangannya, sampai akhir tahun sepertinya realisasinya hanya mencapai kurang 85 persen. Saya kira ini adalah kinerja yang buruk, padahal pemerintah sudah gunakan Pengampunan Pajak (tax amnesty) juga. Tertangkap tangannya petugas pajak oleh KPK juga memunculkan pertanyaan publik akan efektifitas reformasi pada institusi perpajakan kita," papar Ecky di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/12).

Sebagaimana diketahui, berdasarkan data realisasi pajak per 31 Oktober 2016, penerimaan perpajakan baru mencapai Rp986,6 triliun atau 64,1 persen dari target APBN 2016, yaitu sebesar Rp1.539,2 triliun. Realisasi pajak tersebut sedikit lebih baik dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya senilai Rp893,9 triliun dari Rp1.489,3 triliun atau sebesar 60 persen.

"Dengan data tersebut kita bisa melihat kenaikan penerimaannya belum signifikan padahal sudah memasukkan hasil tebusan dari Pengampunan Pajak. Jadi efektifitas secara keseluruhan tidak nampak. Secara umum ini mengindikasikan adanya *trade-off* antara *tax amnesty* dengan target penerimaan pajak secara regular," jelas Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Ecky menambahkan, jika benar prognosa penerimaan perpajakan tahun 2016 hanya di kisaran 85 persen, hal ini akan mengulang kondisi tahun sebelumnya. Ecky memberikan catatan khusus atas tidak tercapainya target penerimaan perpajakan tahun 2015, yang hanya tercapai sebesar 83,2 persen atau setara dengan Rp1.240 triliun dari target APBNP 2015. Hal ini lebih rendah dari pencapaian penerimaan perpajakan tahun 2014 yang mencapai 92,04 persen, dan 2013 yang mencapai 93,81 persen serta tahun 2012 yang

mencapai 94,4 persen.

"Ini harus menjadi pelajaran berharga, di mana pencapaian penerimaan perpajakan masih membutuhkan langkah-langkah terobosan yang kuat. Upaya untuk mencapai target harus dijalankan lebih kredibel karena akan berpengaruh signifikan terhadap komponen-komponen lain dalam APBN, terutama realisasi defisit dan utang, serta beban biaya bunga utang yang akan ditanggung ke depan," jelas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III yang meliputi Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

Dampak lain yang signifikan ke depan menurut Ecky adalah risiko pemotongan anggaran akan berulang. Diketahui, sepanjang tahun 2016, pemerintah telah melakukan pemangkasan anggaran dengan total Rp137,6 triliun, yang terdiri dari transfer daerah dan dana desa sebesar Rp72,9 triliun dan anggaran kementerian dan lembaga senilai Rp64,7 triliun.

Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang mendapat pemangkasan anggaran terbesar dengan nilai Rp7,3 triliun. Selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipangkas Rp6,9 triliun dan anggaran Kementerian Pertanian dikurangi Rp5,9 triliun. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mendapat jatah pemotongan anggaran sebesar Rp5,5 triliun, Kementerian Perhubungan Rp4,7 triliun, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp3,9 triliun, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan dipotong Rp3 triliun.

"Pemotongan anggaran di tengah tahun anggaran menimbulkan dampak pada koreksi ekonomi dan pelambatan pertumbuhan secara keseluruhan. Karena belanja pemerintah sebagai *driver* ekonomi lainnya mengalami koreksi signifikan," jelas Ecky.

Untuk meningkatkan penerimaan perpajakan ke depan, Ecky memandang pemerintah harus bersungguh-sungguh mencari terobosan. Pemerintah perlu secara serius dan tegas dalam menggali sektor-sektor yang masih *under-tax*.



Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam

"Pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan pada dasarnya masih jauh dari optimal. *Tax ratio* yang stagnan dan bahkan menurun beberapa tahun terakhir perlu menjadi perhatian serius," lanjut Ecky.

Berdasarkan data Direktorat Perpajakan, jumlah wajib pajak yang terdaftar hanya sebesar 30,04 juta (2,4 juta WP Badan, 5,24 juta WP Pribadi Non-karyawan dan 22,4 juta WP Pribadi Karyawan). Padahal, menurut data BPS jumlah pekerja di Indonesia mencapai 93,72 juta, atau artinya hanya 29,4% yang terdaftar sebagai wajib pajak.

"Salah satu kebijakan besar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan perpajakan yang belum diselesaikan pemerintah adalah reformasi perpajakan, yang menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan penerimaan perpajakan secara komprehensif dan berkelanjutan," tutur alumnus STAN ini.

Pemerintah juga perlu meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menurunkan tingkat *tax evasion* dan mereduksi praktik *transfer pricing* khususnya oleh perusahaan asing. Pemerintah juga perlu lebih serius untuk melanjutkan pengusutan penggelapan pajak dari aktivitas 2.000 PMA dengan potensi pajak yang hilang mencapai Rp500 triliun yang sering disampaikan Menteri Keuangan pada berbagai media sebelumnya.

"Hal yang juga penting adalah reformasi Dirjen Pajak dan pemenuhan kebutuhan SDM yang berintegritas tinggi. Tidak boleh lagi ada pengkhianat yang melakukan korupsi dan meruntuhkan kepercayaan publik pada institusi pajak," tutup Ecky. ■

# Pembangunan Infrastruktur Jangan Miskinkan Masyarakat

Semangat mendirikan Pendidikan Islam (Pendis) di Provinsi Sulawesi Selatan cukup tinggi, namun yang dikelola negara jumlahnya sedikit. Dari jumlah 1.368 madrasah hanya sekitar 100 madrasah yang berstatus negeri atau hanya 8 persen.

**P**embangunan infrastruktur yang mengharuskan menggosur lahan masyarakat, seharusnya tidak memiskinkan masyarakat. Penggosuran lahan, termasuk pemukiman, dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Pasalnya, nilai ganti rugi terkadang tidak sebanding, saat masyarakat ingin membeli lahan yang baru.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman

Khaeron, usai menerima aspirasi masyarakat Desa Sukamulya, Jawa Barat, di Kantor Kepala Desa, Majalengka, Kamis (1/12). Desa Sukamulya merupakan salah satu desa yang sebagian wilayahnya akan digunakan untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).

Dalam kesempatan ini, masyarakat juga mengeluhkan, lahan pertanian produktif mereka yang luasnya mencapai lebih dari 6000 hektar, harus direlakan untuk pembangunan BIJB. Masyarakat juga mengeluhkan, tidak ada perundingan dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat.

"Setiap kali pembangunan infrastruktur dibuat, yang dapat mengurangi terhadap luas lahan pertanian, semestinya harus ada jalan keluar. Bagaimana supaya penggosuran lahan ini dapat terganti dengan lahan yang baru, yang tentu produktifitasnya sama, atau bahkan lebih tinggi lagi," tegas Herman.

Politisi F-PD ini juga mendapatkan aspirasi, masyarakat Desa Sukamulya tidak mendapatkan akses dan pelayanan yang baik dari Pemerintah Provinsi Jabar terkait program pembangunan ini. Ia menekankan, harus ada ganti rugi yang layak. Bahkan relokasi pemukiman masyarakat.

"Dalam pemikiran kami, bahwa sesungguhnya harus ada ganti rugi. Kalaupun harus direlokasi, harus manusiawi. Harus memenuhi unsur-unsur yang menurut saya, sama saat ini mereka hidup di sini. Apalagi mereka sudah sangat nyaman hidup di sini dan dalam kesatuan sosial, dengan mata pencaharian bertani yang cukup tinggi hasilnya," imbuh Herman.

Hal yang lain menurut Herman janggal adalah munculnya rumah-rumah tidak berpenghuni yang dibangun di sekitar lokasi pembangunan BIJB. Rumah-rumah ini diduga dibangun oleh



*Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron saat menerima aspirasi masyarakat Desa Sukamulya, Kec Kertajati, Kab Majalengka, Jawa Barat.*

oknum yang mengeruk keuntungan dari pembangunan BIJB. Pasalnya, jika terdapat rumah dan lahan, ganti rugi yang didapatkan lebih tinggi. Oleh warga sekitar rumah tidak berpenghuni ini disebut rumah hantu.

"Di sini banyak dibangun bangunan-bangunan kosong. Bangunan yang menurut saya akal-akalan. Kalau kemudian terjadi hal yang kemudian meningkatkan biaya ganti rugi dari akal-akalan itu sebetulnya sudah

melanggar terhadap persoalan hukum," tegas Herman.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu mengingatkan, dampak dari pembangunan ini harus diminimalisir. Jangan sampai masyarakat mendapat imbas yang membebani. Ia juga meminta, harus ada solusi yang tepat dan manusiawi, serta menjamin masa depan masyarakat.

"Yang mereka inginkan, secara sistem sosial tidak terganggu, mata pencaharian jelas, dan tentu jangan kemudian relokasi menyebabkan kemiskinan bagi masyarakat. Kita bangun solusi yang tepat dan manusiawi. Lahan pertanian yang produktif juga jangan terganggu," harap Herman.

Dalam kesempatan itu, Kepala Desa Sukamulya mengapresiasi kehadiran Komisi IV DPR RI. Menurutnya, baru kali ini masyarakat Desa Sukamulya diakui keberadaannya. Kades Sukamulya menjelaskan, masyarakat mengeluhkan, pembuatan Analisa mengenai Dampak lingkungan (AMDAL) yang menyatakan bahwa lahan di Desa Sukamulya adalah lahan tandus yang tidak produktif yang hanya bisa panen satu kali dalam satu tahun dengan produksi gabah kering giling sebanyak 6 kwintal per hektar. Padahal data dari dinas pertanian Kab. Majalengka, tahun 2005 dan BPS Kabupaten Majalengka adalah 52,35 kwintal per hektar.

Kunjungan kerja ini juga diikuti oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (F-PG, dapil DI Yogyakarta), dan Anggota Komisi IV Yadi Srimulyadi (F-PDI Perjuangan, dapil Jabar), Luther Kombong (F-Gerindra, dapil Kaltim), dan O.O Sutisna (F-Gerindra, dapil Jabar). ■

*(Sf) foto: soejan@dr*

# JENDELA PARLEMEN

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344

[@dpr\\_ri](#)

[DPR RI](#)

[@DPR\\_RI](#)

[DPR RI](#)



Ketua DPR RI menerima panitia perayaan Natal dan Tahun Baru sekaligus proyek pembangunan rumah ibadah di lingkungan DPR RI. (06/12)  
Foto : Andri/hr

Suasana Rapat Komisi III DPR RI dengan Kapolri terkait penanganan kasus menjadi isu nasional. (05/12)  
Foto : Arief/hr



Raker Pansus RUU Pemilu DPR RI dengan DKPP dan KPU. (07/12)  
Foto : Jaka/hr